



STRATEGI PENGEMBANGAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI DESA BIKEKNENO KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Maria Charolina Timbu¹, Ika Kristinawanti², Rynaldo Davinsky^{3*}, Fabianus Ranta⁴, Laurentius D.
Wisnu Wardhana⁵, Blasius Paga⁶, Aah Ahmad Almulqu⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Kehutanan, Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Kota Kupang, Indonesia

Email: ryaldo024@gmail.com

*korespondensi

Abstract

The primary purpose of the state forest known as Community Forest (HKm) is to empower nearby communities. To put it another way, HKm is the best forest management strategy for enhancing forest potential through community involvement. The purpose of this study is to identify work programs that have been put into place and examine potential development strategies for the HKm program run by Gapoktan Olif Tataf. Direct observation at the HKm location and questionnaire-based interviews were used to gather data. In order to identify internal and external elements in the HKm development program, the data gathered from the 103 Gapoktan members who participated in the study was examined using SWOT analysis. The study's findings demonstrated that the work programs that have been carried out in collaboration with Olif Tataf Gapoktan members include regular meetings, conservation efforts, forest area security and protection initiatives, KTH member formation, and structural programs. Based on the predetermined planning, a few of these programs have not yet been put into action. With an internal factor value of 0.40 and an external factor value of 0.39, the HKm development strategy—an aggressive development strategy—is implemented in Bikekno Village through the social forestry initiative with Olif Tataf Gapoktan. When this scenario is highly lucrative, it can leverage its capabilities to seize current possibilities and turn them into a benefit for the HKm program.

Keywords: HKm work program, development strategy, SWOT.

Abstrak

Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara dimana pemanfaatan utama ditujukan untuk memberdaya masyarakat setempat. Dengan kata lain, HKm merupakan langkah pengelolaan hutan yang tepat untuk meningkatkan potensi hutan dengan melibatkan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program-program kerja yang sudah diterapkan dan menganalisis strategi yang dapat digunakan dalam pengembangan program HKm yang dikelola oleh Gapoktan Olif tataf. Data dikumpulkan melalui wawancara berdasarkan kuesioner dan observasi langsung ke lokasi HKm. Jumlah responden pada penelitian ini adalah 103 orang yang merupakan anggota gapoktan, data yang dikumpulkan dari responden kemudian dianalisis menggunakan SWOT untuk mengetahui faktor internal dan faktor eksternal dalam program pengembangan HKm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kerja yang sudah diterapkan bersama anggota Gapoktan Olif Tataf meliputi, pembentukan anggota KTH, kegiatan konservasi, kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, program struktural dan pertemuan rutin. Dari program tersebut ada beberapa program yang belum dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang sudah ditetapkan. Strategi pengembangan HKm melalui program perhutanan sosial bersama Gapoktan Olif Tataf, di Desa Bikekno adalah strategi (SO) atau strategi pengembangan agresif dengan nilai faktor internal 0,40 dan eksternal 0,39. Dimana situasi ini sangat menguntungkan, sehingga dengan kekuatan yang dimiliki dapat memanfaatkan peluang yang ada menjadi keuntungan bagi program HKm.

Kata Kunci: Program Kerja HKm, Strategi Pengembangan, SWOT.

1. Pendahuluan

Hutan sebagai sumber kekayaan alam dan penyangga kehidupan yang perlu dikelola secara lestari, sehingga dapat memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung. Salah satu bentuk tata kelola hutan yang dapat diyakini dan memenuhi kriteria tersebut adalah pengelolaan hutan melalui pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan (*Community based development*). Wujud dari *community based development* adalah salah satu pembangunan program Perhutanan Sosial dengan pola Hutan Kemasyarakatan (HKm). HKm merupakan program dan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melakukan pemberdayaan potensi masyarakat desa melalui pemanfaatan sumber daya hutan dengan tetap menjaga fungsi ekonomi, fungsi sosial budaya dan fungsi ekologi dari sumber daya

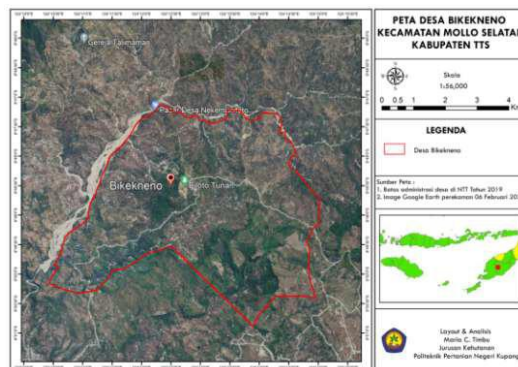
hutan (Wiratno, 2015). Dengan kata lain, HKm merupakan langkah pengelolaan hutan yang tepat untuk meningkatkan potensi hutan dengan melibatkan masyarakat.

Salah satu Provinsi di Indonesia yang telah menerapkan pengelolaan program HKm adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kecamatan Mollo Selatan, Desa Bikekno, yang dikelola oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Olif Tataf dibawah naungan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah Kabupaten TTS. Berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: SK. 5859/MENLHK. PSKL/ PSL.0/10/2017 tentang pemberian izin usaha pemanfaatan lahan seluas 378 Ha pada kawasan hutan lindung yang izin usaha diberikan kepada 6 kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan Olif Tataf dengan jumlah 130 anggota dengan jangka waktu 35 tahun. Dari total luas kawasan 378 Ha baru dikelola oleh anggota seluas 260 Ha, jadi setiap anggota mengelola lahan seluas 2 Ha dengan jenis kegiatan yang dilakukan dengan sistem agroforestri sederhana.

Pengelolaan HKm juga menetapkan berbagai program-program yang ada, antara lain penetapan kebijakan pengelolaan HKm, kegiatan kerja tahunan yang meliputi (kegiatan konservasi, perlindungan dan pengawasan kawasan hutan, program struktural, pendampingan dan pertemuan rutin) dan HKm sebagai sumber pendapatan bagi anggota KTH, dimana anggota membudidayakan berbagai jenis komoditi di lahan garapannya, tanpa merusak fungsi asli hutan (Mulyana dan Moeis, 2022; Pambudi 2023). Maka diasumsikan bahwa dengan penetapan program-program kerja yang ada membawa dampak positif bagi masyarakat (Elisabeth, 2017). Selain itu dengan penetapan program yang ada, berdasarkan keberadaan kawasan HKm Bikekno menjadi sumber utama pendapatan masyarakat, dengan mengurangi tingkat pengangguran, serta menambah pengetahuan anggota gapoktan dalam bertani dan melindungi kawasan hutan lindung (Yuwono & Andani 2019). Namun, belum ada tindakan yang tepat dari masyarakat dan strategi yang tepat seperti, tingkat keingintahuan (kosmopolitan) masyarakat masih rendah, pengadministrasian hasil panen KTH belum dijelaskan secara terperinci dan pemasaran belum maksimal, mengelola hasil panen menjadi suatu produk, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus ternak dan terjadinya perubahan iklim yang tidak menentu yang menjadi ancaman utama bagi para anggota yang mengelola lahan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka diperlukan suatu kajian guna mendapatkan strategi pengembangan HKm dalam program perhutanan social dalam mengatasi berbagai ancaman dan kelemahan dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada dalam mengelola lahan HKm bersama Gapoktan Olif Tataf dibawah naungan UPTD KPH Timor Tengah Selatan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bikekno, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Desa tersebut merupakan desa pemegang izin perhutanan sosial berupa skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kawasan Hutan Lindung di bawah naungan UPTD KPH Timor Tengah Selatan. Lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Lokasi Penelitian di Desa Bikekneno

Metode pengambilan sampel pada penelitian ini yakni dengan menggunakan penelitian *sensus*. Penelitian *sensus* merupakan penelitian yang mengambil satu kelompok populasi sebagai sampel secara keseluruhan dan menggunakan kuesioner yang terstruktur sebagai alat pengumpulan data yang pokok untuk mendapatkan informasi yang spesifik (Emzir 2009; Supriatna *et al.* 2024). Berdasarkan informasi tersebut, maka penelitian ini merupakan jenis penelitian *sensus* dengan bantuan kuesioner, dimana responden adalah seluruh anggota Gapoktan Olif Tataf yang berada di Desa Bikekneno, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten TTS. Sehingga populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat atau anggota gapoktan yang terlibat dalam mengelola lahan HKm yang ditetapkan berdasarkan SK.5859/ MENLHK-PSKL/ PKPS/PSL.0/10/2017, dengan jumlah anggota 103 orang. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah sampel total atau seluruh anggota populasi. Hal ini dikarenakan penelitian yang dilakukan merupakan penelitian *sensus* dimana metode ini berlaku jika anggota populasi relatif kecil atau mudah dijangkau. Selain itu untuk melengkapi data penelitian, peneliti juga mewawancarai pendamping program HKm, aparat desa sebagai key informan.

Pengambilan Data berupa pertama Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian (Emzir 2009; Nazir 2013). Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap keadaan lokasi penelitian yaitu lahan HKm Bikekneno. Kedua Wawancara adalah merupakan proses untuk memperoleh informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan subjek yang diteliti (Emzir 2009; Nazir 2013). Pengumpulan data dilakukan dengan cara tanya jawab terhadap anggota Gapoktan Olif Tataf, pendamping lapangan dan aparat Desa Bikekneno, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. Ketiga yaitu kuesioner atau angket adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur (responden). Dengan kuesioner ini orang dapat diketahui tentang keadaan/data diri, pengalaman, pengetahuan sikap atau pendapatnya dan lain-lain (Arikunto, 2013). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang belum terstandar, sehingga untuk menghindari dihasilkannya data tidak sah terlebih dahulu dilakukan uji coba terhadap kuesioner tersebut. Kuesioner yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan reliabel.

Analisis Data berupa data kualitatif pada penelitian meliputi data program kerja yang telah diterapkan bersama Gapoktan Olif Tataf dari awal terbentuknya HKm di wilayah Desa Bikekneno. Data ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi langsung ke lokasi HKm kepada Anggota Gapoktan, pendamping lapangan, dan data diperoleh dari sumber bacaan

dan di analisis secara deskriptif. Analisis Kuantitatif merujuk pada rumusan masalah yang kedua yaitu mengukur strategi yang dapat digunakan untuk pengembangan HKM dalam program perhutanan sosial.

Pengukuran instrumen diukur menggunakan gradasi sangat setuju sampai tidak setuju kemudian dianalisis menggunakan SWOT (Tampubolon *et al* 2021; Supriatna *et al* 2024). Berikut ini langkah-langka analisis data pada analisis SWOT yaitu: Pertama Mengumpulkan informasi dan mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden kemudian data yang dikumpulkan dimasukkan kedalam tabel analisis SWOT; Kedua yaitu Penentuan faktor strategi internal dan eksternal dilakukan dengan membuat matriks *Internal Factros Analisis Summary* (IFAS) dan *External Factors Analisis Summary* (EFAS). Analisis internal digunakan untuk memaksimalkan kekuatan dan kelemahan. Sedangkan analisis eksternal dilakukan untuk mengembangkan faktor peluang yang perkiraannya dapat dimanfaatkan faktor ancaman yang perlu dihindari. Matriks IFAS dan EFAS dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Matriks *Internal Factros Analisis Summary* (IFAS) dan atau *External Factors Analisis Summary* (EFAS)

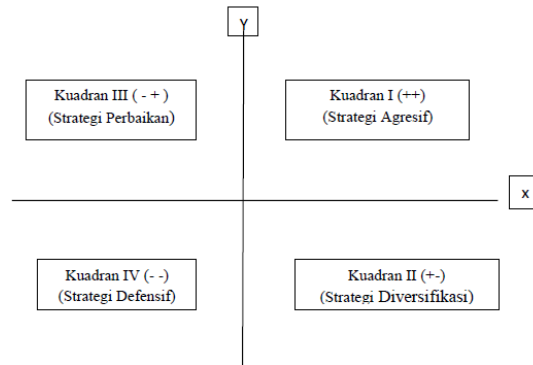
IFAS/ EFAS	Bobot	Rating	Skor
Kekuatan:			
1.			
dst.			
Jumlah			
Kelemahan:			
1.			
dst.			
Jumlah			
Jumlah IFAS	1,0		
Peluang:			
1.			
dst.			
Jumlah			
Ancaman:			
1.			
dst.			
Jumlah			
Jumlah EFAS	1,0		

Selanjutnya ketiga Menurut Tampubolon *et al* (2021); Supriatna *et al* (2024) untuk pengisian tabel internal dan eksternal dapat dilakukan dengan tahap sebagai berikut: A. Melakukan pengisian di dalam kolom 1 (berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman); B. Melakukan pembobotan pada kolom 2, dengan skala mulai dari angka 1,0 (sangat penting) sampai 0,0 (tidak penting). Semua bobot jumlahnya tidak boleh lebih dari skor total 1,0. Nilai bobot didapat dari pembagian nilai taraf signifikan satu parameter dengan keseluruhan parameter; C. Melakukan ranting pada kolom 3, dengan skala mulai dari 4 (maksimum) sampai dengan 1 (minimum). Keterangan : 1 (Sangat Tidak Setuju) : 2 (Tidak Setuju) : 3 (Setuju) : 4 (Sangat Setuju); D. Pada kolom 4 akan diperoleh skor yang merupakan hasil perkalian bobot dengan ranting; E. Melakukan penjumlahan nilai yang ada dikolom 4, sehingga akan diperoleh total nilai.

Keempat yaitu kemudian untuk mengetahui posisi dan perkembangan strategi dalam kuadran SWOT maka dihitung dengan rumus:

$$\text{Total Pembobotan Kekuatan} - \text{Total Pembobotan Kelemahan} = (\text{X})$$

Total Pembobotan Ancaman – Total Pembobotan Peluang = (Y).....(1)



Gambar 2. Diagram Letak Kuadran Analisis SWOT

Kelima atau langkah yang terakhir adalah merumuskan alternative-alternatif strategi pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Bikekno, kedalam matriks SWOT berdasarkan faktor-faktor yang telah diidentifikasi (Tabel 2).

Tabel 2. Matrik SWOT

IFAS	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
EFAS Peluang (O)	Strategi SO (Gunakan kekuatan yang ada untuk memanfaatkan peluang)	Strategi WO (Atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang)
Ancaman (T)	Strategi ST (Gunakan kekuatan untuk menghindari ancaman)	Strategi WT (Meminimilisasikan kelemahan dan menghindari ancaman)

3. Hasil dan Pembahasan

Adapun hasil penelitian menyebutkan Program Kerja HKm Bersama Anggota Gapoktan Olif Tataf, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta pemanfaatan Hutan, KPH telah menjadi inti dari kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia. Program kerja dalam KPH diatur dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) yang merupakan pedoman dalam rencana pengelolaan hutan tingkat strategis dengan jangka pembangunan KPH selama 10 tahun. Menurut World Bank (2013) dalam Amalia (2019) tidak hanya menekankan pengelolaan jangka panjang dalam pengelolaan hutan oleh KPH, tetapi juga pengelolaan jangka pendek, serta konsultasi dengan kelompok masyarakat, pemegang ijin dan para pemangku kepentingan lainnya. Implementasi kegiatan-kegiatan di KPH harus melibatkan masyarakat lokal secara partisipatif dan menangani isu-isu sosial dan konflik, termasuk konflik tenurial, akses terhadap sumber daya hutan dan hak adat. Adanya KPH diharapkan mampu memastikan program-program kerja yang lebih efektif dan efisien, baik dalam rangka rehabilitas lahan kritis, pemanfaatan hutan yang lestari, pemberdayaan masyarakat maupun perlindungan hutan (Arifandy *et al.* 2015).

Program kerja pertama meliputi adanya Kebijakan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Desa Bikekno memberikan peluang nyata untuk dapat ikut mengolah hutan/mendapatkan manfaat hutan bagi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Hal tersebut antara lain dapat

memberi akses kepada masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama untuk membangun dalam pengelolaan hutan (Wiratno, 2017). Model seperti ini sejalan dengan konsep *community-based forest management* (CBFM) yang telah terbukti efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian hutan. Rijal (2024); Lawasi (2024) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perhutanan sosial masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan dalam tata kelola kelembagaan, kawasan, dukungan finansial, kolaborasi pemangku kepentingan dan usaha. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kapasitas teknis dan pendampingan yang memadai bagi pemegang izin HKm dalam pengelolaan lembaga. Salah satu kebijakan HKm yang berada di Desa Bikekno, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten TTS, berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung bersama narasumber, penerapan kebijakan HKm dalam pelaksanaannya sampai mendapatkan izin mengelola kawasan yaitu pembentukan kelompok tani hutan, pembuatan dan pengajuan proposal perizinan mengelola kawasan dan penetapan wilayah kelola kawasan hutan yang diajukan sebagai lahan HKm.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, aspek pengembangan HKm dalam masyarakat pada umumnya mengikuti aturan-aturan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang sudah ditetapkan oleh KPH TTS yang berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang pengelolaan Perhutanan Sosial (RPHJP KPH TTS, 2023). Berdasarkan aspek pengawasan, peran Pemerintah dalam mengawasi anggota Gapoktan Olif Tataf dengan melakukan pemantauan dan monitoring dalam sistem pengelolaan masyarakat. Selain fungsi pengawasan administratif dan teknis, pemerintah juga aktif dalam pemberian pengetahuan dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan penyuluhan. Tujuannya adalah untuk mendukung keberlangsungan kegiatan di lahan Hutan Kemasyarakatan (HKm), termasuk: Pengembangan model agroforestri berbasis potensi lokal, Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), mulai dari tahap pembibitan, penanaman, hingga pemeliharaan, serta penguatan kelembagaan. Menurut Hombokau *et al.*, (2023) menekankan pentingnya strategi dalam pengelolaan hutan khususnya HKm melalui penguatan kelembagaan kelompok tani hutan, fasilitasi investasi, dan pengembangan sistem agroforestri yang bernilai ekonomi dan program kerja yang terstrukturisasi.

Program kerja selanjutnya adanya Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bersama Anggota Gapoktan Olif Tataf, Hutan Kemasyarakatan (HKm), merujuk pada hutan negara yang dimanfaatkan terutama untuk memberdayakan masyarakat yang tinggal di dalam dan disekitar kawasan hutan. RKT yang dilakukan bersama anggota merupakan instrumen penting dalam tata kelola organisasi maupun kelompok masyarakat. RKT berfungsi sebagai pedoman operasional yang sistematis dan terukur, sehingga memudahkan koordinasi, pengorganisasian sumber daya, serta pelaksanaan program secara efektif dan efisien. Selain itu, RKT juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan, serta memperkuat partisipasi aktif anggota dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja. Dengan demikian, RKT menjadi dasar yang esensial dalam mendukung keberlanjutan program dan pemberdayaan anggota secara berkelanjutan (Fisher & Maritz, 2023; Sari & Rahman, 2021). Kesesuaian persetujuan Perhutanan Sosial sudah dimandatkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 83 Tahun 2016. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan responden serta RKT yang sudah terselenggarakan dalam program HKm bersama Gapoktan Olif Tataf dari

awal terbentuknya HKM di Desa Bikekno yang sudah menuju kearah yang lebih baik. Masing-masing dari pelaksanaan program kegiatan menunjukkan hasil (*output*) yang sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. RKT berupa Kegiatan konservasi, perlindungan dan pengamanan kawasan hutan; penanaman; pemeliharaan; pemanenan; pendampingan dan pertemuan rutin; dan ada sebagian program kerja yang belum dilaksanakan oleh anggota antara lain mengolah hasil panen menjadi suatu produk dengan nilai ekonomi tinggi.

Selanjutnya, masyarakat memanfaatkan potensi Kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKM) Bikekno dengan memelihara pohon-pohon kehutanan yang masih asri di lokasi tersebut. Pendekatan konservasi ini diwujudkan melalui komitmen masyarakat desa yang tidak melakukan penebangan pohon di kawasan Hutan Lindung tanpa persetujuan atau izin resmi dari KPH TTS. Sikap ini mencerminkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga fungsi ekologis hutan sebagai penyangga kehidupan dan sumber daya alam yang lestari. Dalam rangka menjaga kelestarian kawasan hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mereka mengelola lahan dengan prinsip keberlanjutan melalui sistem agroforestri. Sistem ini mengintegrasikan tanaman kehutanan, tanaman pertanian, serta tanaman pakan ternak dalam satu kesatuan lahan, sehingga memberikan manfaat ekologis dan ekonomi yang optimal serta menjaga fungsi asli kawasan hutan (Khasanah *et al.*, 2023; Prasetyo & Wicaksono, 2022).

Strategi Pengembangan HKM Bikekno menggunakan Analisis SWOT merupakan suatu instrumen pengidentifikasi berbagai faktor yang terbentuk secara sistematis yang digunakan untuk dapat merumuskan strategi pengembangan (Sitorus 2022; Satria *et al* 2023). Hutan Kemasyarakatan di Desa Bikekno bersama Gapoktan Olif Tataf, baik faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman). Setelah informasi mengenai faktor internal dan eksternal yang diperoleh dari responden anggota Gapoktan Olif Tataf, maka langkah yang kedua adalah pemberian bobot, rating pada faktor internal (IFAS) dan faktor eksternal (EFAS).

Tabel 3. Faktor Internal dan Eksternal

Faktor Internal		Faktor Eksternal
No	Kekuatan	Peluang
1	Keberadaan HKM di Desa Bikekno sangat membantu pendapatan bagi masyarakat (Anggota Gapoktan)	Tata kelola kawasan HKM Bikekno dapat dilakukan dengan efektif dan efisien
2	Terbentuknya kelembagaan kelompok masyarakat yang terlegalisasi	Pengembangan potensi pada kawasan lebih beragam
3	Memiliki program kearifan lokal di kawasan HKM	Masih luas lahan HKM yang kosong, belum dikelola
4	Kondisi dan kesuburan tanah di HKM Bikekno sangat cocok untuk aktifitas pertanian	Terbentuknya hubungan dan kerjasama dengan para <i>stakeholder</i>
5	Terjaganya kawasan Hutan Lindung dari perambahan	
Kelemahan		Ancaman
1	Kapasitas kemampuan SDM masih rendah	Adanya gangguan ternak warga sekitar lahan HKM
2	Kurangnya minat generasi muda dalam bertani	Kurangnya minat regenerasi muda dalam bertani
3	Tingkat keingintahuan (Kosmopolitan) masyarakat masih rendah	Rendahnya tata kelola Lahan HKM
4	Pengadministrasian hasil panen KTH belum dijelaskan secara terperinci dan pemasaran belum maksimal Program HKM yang diterapkan belum terarah dengan baik	Pengaruh perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu setiap tahun

Faktor Strategi Internal Factros Analisis Summary (IFAS) menggambarkan bagaimana faktor-faktor yang berasal dari dalam kawasan HKm yang dipertimbangkan untuk merumuskan strategi pengembangan HKm Bikekneno. Faktor-faktor internal dibagi menjadi dua bagian, yaitu faktor kekuatan dan kelemahan. IFAS ini penting untuk membantu pengambil kebijakan dan pelaku pengelolaan HKm dalam menentukan prioritas dan langkah strategis yang tepat guna mengoptimalkan potensi sekaligus meminimalkan kelemahan yang ada (Fitriani, 2022; Rudiyanto & Dina, 2021).

Tabel 4. Faktor *Strategi Internal Factros Analisis Summary (IFAS)*

No	Faktor Kekuatan	Bobot	Rating	Skor
1	Keberadaan HKm di Desa Bikekneno sangat membantu pendapatan bagi masyarakat (anggota gapoktan)	0,11	3	0,33
2	Terbentuknya kelembagaan kelompok masyarakat yang terlegalisasi	0,11	4	0,44
3	Memiliki program kearifan lokal di kawasan HKm	0,11	4	0,44
4	Kondisi dan kesuburan tanah di HKm bikekneno sangat cocok untuk aktivitas pertanian	0,10	3	0,30
5	Terjaganya Kawasan Hutan lindung dari perambahan	0,11	4	0,44
Jumlah		0,54		1,95
Faktor Kelemahan		Bobot	Rating	Skor
1	Kapasitas kemampuan SDM masih rendah	0,09	3	0,27
2	Kurangnya minat generasi muda dalam bertani	0,10	3	0,30
3	Tingkat keingintahuan (Kosmopolitan) masyarakat masih rendah	0,11	4	0,44
4	Pengadministrasian hasil panen KTH belum dijelaskan secara terperinci dan pemasaran belum maksimal	0,10	3	0,33
5	Program HKm yang diterapkan belum terarah dengan baik	0,06	3	0,18
Jumlah		0,46		1,55
Total		1,00		3,50

Tabel 4 menyimpulkan bahwa terdapat kekuatan utama dalam pengelolaan HKm ini yaitu Terbentuknya kelembagaan kelompok masyarakat yang terlegalisasi (0,44), menunjukkan bahwa kelembagaan akan sangat berpengaruh terhadap pengelolaan HKm. Hombokau *et al.*, (2023) mengungkapkan bahwa terbentuknya kelembagaan dalam kelompok masyarakat, akan mendukung keberhasilan HKm. Kemudian adanya program kearifan lokal di kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm), seperti yang diterapkan di yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam pengelolaan hutan, maka keberlanjutan fungsi ekosistem hutan dapat terjaga, sehingga terjaganya kawasan hutan lindung dari perambahan dan kerusakan lingkungan dapat terwujud secara optimal. Penelitian Dailami *et al.*, (2024) menjelaskan pengelolaan dan pelestarian hutan berdasarkan nilai-nilai budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem hutan.

Keberadaan lembaga masyarakat yang terorganisir dan program lokal di kawasan HKm juga menjadi kekuatan penting dalam mendukung seluruh kegiatan. Program ini tidak hanya memperkuat fungsi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar, tetapi juga berperan signifikan dalam menjaga keberlanjutan fungsi ekologis hutan, sehingga terjaganya kawasan hutan lindung dari perambahan, penebangan liar, dan kerusakan lingkungan dapat terwujud secara optimal dan berkelanjutan. Kemudian hambatan utama berasal dari kelemahan yaitu Tingkat

keingintahuan (Kosmopolitan) masyarakat masih rendah (skor yaitu 0,44) yang berdampak pada partisipasi yang minim dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program HKm. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses informasi, rendahnya tingkat pendidikan, serta kurangnya pemahaman mengenai manfaat jangka panjang dari pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm) bersama Gapoktan Olif Tataf, di Desa Bikekno, Kecamatan Mollo Selatan terdapat 5 faktor kekuatan dan kelemahan. Setelah dilakukan perkalian dari bobot dan rating faktor strategi internal pengembangan HKm di Desa Bikekno diperoleh skor kekuatan 1,95 dan skor kelemahan 1,55 dengan skor total yaitu 3,50. Nilai total skor IFAS = 3,50, menunjukkan posisi internal cukup kuat, namun selisih antara kekuatan dan kelemahan relatif kecil (0,40 poin). Mengindikasikan bahwa meskipun terdapat fondasi internal yang mendukung, masih ada tantangan signifikan yang perlu segera diatasi. Salah satu tantangan utama terletak pada aspek sumber daya manusia (SDM) dan regenerasi petani, yang menjadi faktor krusial dalam menjaga kesinambungan program. Tanpa penanganan yang tepat terhadap isu-isu ini, potensi keberlanjutan program HKm dapat terancam, sehingga diperlukan strategi penguatan kapasitas SDM serta perencanaan regenerasi yang terarah dan berkelanjutan (Rangkuti, 2019; Rudiyanto & Dina, 2021).

Faktor Strategi External Factors Analisis Summary (EFAS) menggambarkan bagaimana faktor-faktor eksternal dipertimbangkan untuk dapat merumuskan strategi pengembangan HKm Bikekno. Faktor-faktor eksternal dibedakan menjadi dua yaitu peluang dan ancaman (Tampubolon *et al* 2021); (Supriatna *et al* 2024). Analisis EFAS ini membantu dalam mengidentifikasi bagaimana memanfaatkan peluang secara optimal dan merespons ancaman dengan strategi yang adaptif, guna menjamin keberlanjutan pengelolaan HKm Bikekno ke depan. Pembobotan, peratingan dan skoring terhadap indikator peluang dan ancaman diperoleh dari data kuesioner yang sudah diolah (Tampubolon *et al* 2021; Supriatna *et al* 2024).

Tabel 5. Faktor Strategi External Factors Analisis Summary (EFAS)

No	Faktor Peluang	Bobot	Rating	Skor
1	Tata kelola kawasan HKm Bikekno dapat dilakukan dengan efektif dan efisien	0,13	4	0,52
2	Pengembangan potensi pada kawasan lebih beragam	0,13	4	0,52
3	Masih luas lahan HKm yang kosong, belum dikelola	0,13	4	0,52
4	Terbentuknya hubungan dan kerjasama dengan para <i>stakeholder</i>	0,14	4	0,56
Jumlah		0,53		2,12
Faktor Ancaman		Bobot	Rating	Skor
1	Adanya gangguan hama yang mengganggu tanaman di lahan garapan.	0,13	4	0,52
2	Kurangnya tenaga kerja dalam mengelola lahan HKm.	0,12	3	0,42
3	Rendahnya tata kelola lahan HKm.	0,09	3	0,27
4	Pengaruh perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu setiap tahun	0,13	4	0,52
Jumlah		0,47		1,73
Total		1,00		3,85

Berdasarkan analisis faktor eksternal pada pengelolaan kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Bilekno, terlihat bahwa kondisi lingkungan eksternal memberikan peluang yang cukup besar untuk dikembangkan secara optimal. Tata kelola kawasan HKm dapat dilakukan secara efektif dan efisien, didukung oleh potensi kawasan yang beragam dan masih luasnya lahan kosong yang belum dimanfaatkan dengan skor 0,52. Selain itu, terbangunnya hubungan dan kerja sama dengan berbagai pihak atau *stakeholder* skor tertinggi yaitu 0,56 menjadi peluang strategis dalam memperkuat kapasitas pengelolaan dan membuka akses terhadap pendanaan maupun teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kekuatan penting dalam memperkuat kapasitas pengelolaan, membuka akses terhadap pendanaan, serta mempermudah adopsi teknologi tepat guna di tingkat kelompok tani HKm (KLHKA, 2023; Maryudi, 2021). Melalui kemitraan dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, LSM, perguruan tinggi, lembaga donor, serta sektor swasta, kelompok tani memperoleh dukungan dalam bentuk pelatihan, pendampingan teknis, hingga fasilitasi akses pasar dan teknologi. Dukungan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan hutan, tetapi juga memperkuat kelembagaan dan keberdayaan masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya hutan secara berkelanjutan.

Namun demikian, pengelolaan kawasan ini juga menghadapi sejumlah ancaman nyata yang perlu segera diantisipasi. Gangguan hama yang merusak tanaman (0,52), menjadi ancaman yang dapat menghambat produktivitas dan keberlanjutan program HKm. Serangan hama ini tidak hanya menurunkan produktivitas hasil hutan dan pertanian, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi para petani anggota. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan kapasitas dalam pengendalian hama serta minimnya akses terhadap teknologi dan metode pengelolaan hama yang efektif (BPPP, 2023). Ancaman terbesar selanjutnya ialah perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu setiap tahunnya, ketidakpastian pola curah hujan dan suhu ekstrem menyebabkan gangguan terhadap siklus pertumbuhan tanaman, meningkatkan risiko kekeringan maupun banjir yang dapat merusak lahan garapan anggota. Kondisi ini tidak hanya mengancam produktivitas hasil hutan dan pertanian, tetapi juga memperbesar kerentanan ekosistem hutan terhadap serangan hama dan penyakit (KLHKb, 2023).

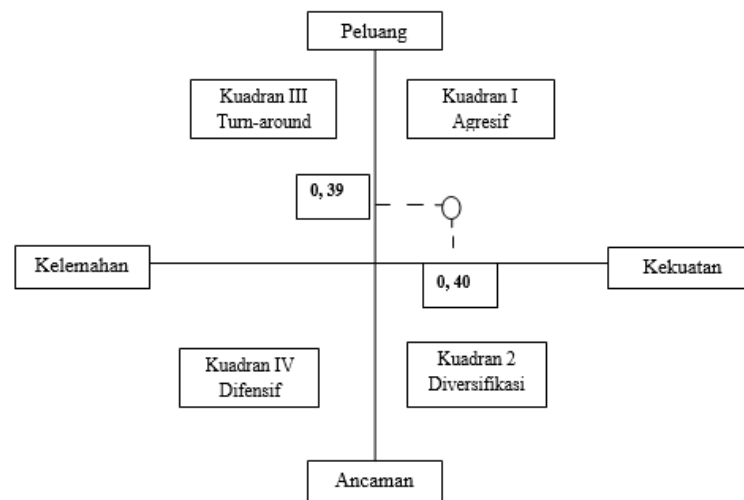
Oleh karena itu, strategi pengembangan kawasan perlu diarahkan pada optimalisasi potensi dan kolaborasi lintas sektor, sekaligus memperkuat kapasitas adaptif masyarakat dalam menghadapi ancaman lingkungan dan sosial secara langsung. Dengan pendekatan ini, HKm Bilekno memiliki peluang besar untuk tumbuh menjadi kawasan yang produktif, lestari, dan berbasis pemberdayaan masyarakat. Dengan total skor 3,85 dari maksimum 5, HKm Bilekno berada pada posisi kuat dalam menghadapi faktor eksternal. Skor peluang (2,12) lebih tinggi dibanding ancaman (1,73) menandakan lingkungan eksternal cukup kondusif jika dimanfaatkan dengan strategi yang tepat.

Matriks Strategi IFAS dan EFAS meliputi data yang telah ada kemudian dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui strategi pengembangan HKm melalui program perhutanan sosial untuk menentukan strategi yang tepat dalam meningkatkan pengembangan HKm bersama Gapoktan Olif Tataf. Langkah yang ketiga adalah menentukan titik koordinat kuadran. Setelah proses perhitungan untuk mendapatkan bobot, rating dan skor pada faktor internal dan eksternal, langkah yang berikut adalah merumuskan alternatif dalam bentuk penentuan posisi kuadran dalam diagram analisis SWOT (Tampubolon *et al* 2021); Supriatna *et al* 2024; Sitorus 2022; Satria *et al* 2023) Penentuan diagram analisis SWOT berfungsi untuk

menentukan posisi kuadran, apakah berada pada kuadran I, II, III atau IV. Hal ini berfungsi untuk menentukan strategi yang akan ditetapkan dalam pengembangan HKm di Desa Bikekno. Dari data pada Tabel 4 dan 5 dilakukan penentuan titik koordinat analisis internal dan eksternal. Berikut perhitungan titik koordinat:

Kekuatan – Kelemahan (faktor internal) : $1,95 - 1,55 = 0,40$

Peluang – Ancaman (faktor eksternal) : $2,12 - 1,73 = 0,39$(2)



Gambar 3. Diagram Letak Kuadran Analisis SWOT

Berdasarkan hasil analisis pada Gambar 10 dapat dijelaskan bahwa strategi pengembangan Hutan Kemasyarakatan melalui program perhutanan sosial bersama Gapoktan Olif Tataf terletak pada posisi Kuadran I atau terletak antara peluang (eksternal) dan kekuatan (Internal) yaitu agresif, yang menggunakan strategi SO (*Strength-Opportunity*) yang dijadikan sebagai strategi prioritas. Menurut Rangkuti (2019) kuadran 1 artinya strategi ini menempatkan program ini di antara kombinasi kekuatan internal yang cukup kuat dan peluang eksternal yang menjanjikan. Strategi agresif ini menuntut perencanaan yang matang, peningkatan kapasitas anggota Gapoktan, dan sinergi dengan berbagai *stakeholder* untuk menjaga keberlanjutan program dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip pengembangan berkelanjutan yang menekankan sinergi antara pengelolaan sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat lokal (Rangkuti, 2019; KLHK, 2023).

Strategi SO adalah strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang artinya adalah menggunakan faktor-faktor kekuatan yang ada di HKm Bikekno untuk mengoptimalkan faktor peluang di HKm Bikekno seperti memanfaatkan keberadaan HKm Bikekno secara maksimal dengan mengelolah lahan yang masih banyak kosong untuk ditanami berbagai jenis tanaman pertanian seperti Kemiri, Kopi, Porang, tanaman obat-obatan, sayuran, umbi-umbian dan kacang-kacangan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota KTH, terbentuknya kelembagaan kelompok KTH yang jelas dan terbentuknya kerja sama masyarakat dengan para *stakeholder* sehingga tata kelola kawasan HKm terarah dengan baik.

Tabel 6. Strategi Pengembangan HKm Desa Bikekno

INTERNAL EKSTERNAL	STRENGTH (S)	WEAKNESS (W)
	<ul style="list-style-type: none"> - Keberadaan HKm di Desa Bikekno sangat membantu pendapatan bagi masyarakat (anggota gapoktan) - Terbentuknya kelembagaan kelompok masyarakat yang terlegalisasi - Terbentuknya program kearifan lokal oleh KTH di kawasan HKm. - Kondisi dan kesuburan tanah di HKm Bikekno sangat cocok untuk aktivitas pertanian - Terjaganya kawasan hutan dari perambahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas kemampuan SDM masih rendah - Kurangnya minat generasi muda dalam bertani. - Tingkat keingintahuan (Kosmopolitan) masyarakat masih rendah. - Pengadministrasian hasil panen KTH belum dijelaskan secara terperinci dan pemasaran belum maksimal - Program HKm yang diterapkan belum terarah dengan baik.
OPPORTUNITY (O)	Strategi SO	Strategi WO
<ul style="list-style-type: none"> - Tata kelola kawasan HKm Bikekno dapat dilakukan dengan efektif dan efisien - Pengembangan potensi pada kawasan lebih beragam - Masih luas lahan HKm yang kosong, belum dikelola - Terbentuknya hubungan dan kerjasama dengan para stakeholder 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan peran pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) seperti Dinas Kehutanan UPTD KPH TTS, Dinas Pertanian, Koperasi, Aparat Desa yang lebih konserensif dan dapat membantu menciptakan keberdayaan masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat dengan ini dimaksud pemberdayaan tidak hanya menyangkut pendanaan tetapi juga meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan kelompok masyarakat. - Terbentuknya kelembagaan kelompok masyarakat yang terlegalisasi dan peraturan-peraturan yang tegas mampu meningkatkan pengembangan potensi pada lahan HKm yang lebih beragam sehingga tata kelola kawasan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. - Draft rancangan areal HKm dengan memanfaatkan kondisi lahan dan kesuburan tanah untuk pengembangan jenis tanaman kayu, non kayu, dan jasa lingkungan sebagai bahan produksi usaha tani dengan nilai ekonomi tinggi dalam mengelola HKm dibawah naungan UPTD KPH TTS. - Terjaganya kawasan Hutan Lindung dari perambahan oleh kelompok masyarakat dan terbentuknya kerja sama dengan para <i>stakeholder</i> sesuai aturan sebagai dasar menyelesaikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan akses informasi dan teknologi, sarana dan prasarana serta insentif bagi pengelolaan masyarakat (KTH) dan mengoptimalkan peran partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tanaman lokal kehutanan, pertanian, dan perkebunan - - Meningkatkan Peran pemerintah yang berperan penting dalam menyiapkan program-program strategis guna menghasilkan SDM berkualitas dan memasuki pasar kerja. Dimana dengan upaya pelatihan, pendampingan, dan evaluasi pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian, kehutanan, perikanan dan peternakan. - Memfasilitasi pelaku usaha yang ingin berinvestasi dengan kelompok masyarakat melalui kerja sama yang saling menguntungkan
THREATS (T)	Strategi ST	Strategi WT
<ul style="list-style-type: none"> - Adanya gangguan ternak warga sekitar lahan HKm - Kurangnya tenaga kerja dalam mengelola lahan HKm - Rendahnya tata kelola lahan HKm - Pengaruh perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu setiap tahun 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi dukungan kebijakan anggaran untuk program perhutanan sosial dan melaksanakan pemagaran pada setiap lahan garapan anggota untuk mencegah terjadinya kerusakan lahan oleh gangguan hama. - Pembinaan masyarakat desa secara terpadu oleh pihak pengelola (penyuluh) berkaitan dengan pemanfaatan dan tata kelola lahan dalam pengembangan program HKm, sehingga mampu mendukung perkembangan ekonomi di Desa Bikekno dan meratakan fungsi lahan yang baik sekaligus menjaga sumber daya alam yang ada agar tidak rusak. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan berbagai bentuk pembinaan dan penyuluhan dari pihak pemerintah terhadap generasi muda yang berada di Desa Bikekno yang menjadi target utama yakni untuk menumbuh kembangkan pengelolaan HKm dimasa mendatang dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Dengan cara membuat program wirausaha mengelola hasil panen dari HKm menjadi suatu produk dengan nilai pasar yang tinggi.

	<p>- Keberadaan program perhutanan sosial membantu masyarakat mengurangi tingkat pengangguran dan membuka lowongan kerja dengan memberi fasilitas lahan kepada anggota sehingga dapat mengurangi gangguan atau kerusakan hutan dari pencurian hasil hutan, perambahan dan tetap menjaga fungsi</p>	<p>- Meningkatkan wawasan para anggota KTH untuk mencegah dalam perubahan iklim dengan mengurangi pemakaian bahan kimia dan pupuk buatan yang dapat merusak lingkungan dengan memanfaatkan bahan limbah organik, salah satu contoh membudidaya jamur tiram dan pembuatan pastisida asap cair.</p>
--	--	---

4. Simpulan

Program kerja yang telah diterapkan dan terlaksanakan di Gapoktan Olif Tataf dalam program perhutanan sosial dengan skema HKm antara lain: Pembentukan anggota kelompok kerja KTH, kegiatan konservasi, perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, dan ada sebagian program kerja yang belum dilaksanakan oleh anggota antara lain mengolah hasil panen menjadi suatu produk dengan nilai ekonomi tinggi. Strategi yang tepat dalam pengembangan Hutan Kemasyarakatan dalam program perhutanan sosial bersama Gapoktan Olif Tataf di Desa Bikekno dibawah naungan UPTD KPH TTS adalah strategi SO (*Strength-Opportunity*) atau strategi pengembangan Agresif. Dimana dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) menggunakan seluruh kekuatan yang ada untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Perlu adanya penelitian lanjutan terkait dengan peningkatan kondisi biofisik lahan, khususnya jenis Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang cocok untuk meningkatkan nilai ekonomi dan fungsi ekologi serta penelitian terkait pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu di Hutan Kemasyarakatan Bikekno.

5. Referensi

- Amalia, D. N. 2019. Revolusi Industri 4.0 dan Generasi Mileneal.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arifandy, I., Sihaloho., & Marta. (2015). Efektivitas Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Sebagai Resolusi Konflik Sunberdaya Hutan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 3(2), 147–158. <https://doi.org/10.22500/sodality.v3i2.11339>.
- [BPPP] Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. (2023). *Laporan Pengendalian Hama Terpadu dalam Sistem Pertanian Berkelanjutan*. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Dailami, H. S., Abbas, R., & Azizah, C. (2024). Analisis Dampak Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) KTH Alue Simantok Aceh Terhadap Kelestarian Hutan Dan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Future Academia*, 2(4), 892–902. <https://doi.org/10.61579/future.v2i4.335>.
- Elisabeth K. 2017. Pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan Hutan Kemasyarakatan untuk menciptakan Kesejahteraan (Studi Kasus Kelompok HKm Karya Bersama di Kampung Marga Jaya Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah). *Skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Lampung.
- Emzir, 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fisher, R., & Maritz, A. (2023). Participatory planning and its impact on community development effectiveness. *Journal of Community Development*, 58(2), 145-162. <https://doi.org/10.1080/15575330.2023.1754126>.
- Fitriani, E. (2022). TOWS analysis on Recissbar to increase its competitiveness. *Journal of Business and Economics Research*, 10(1), 45–58. <https://doi.org/10.1234/jber.v10i1.2022>.
- Hombokau, I. C. A., Tasirin, J. S., & Walangitan, H. D. (2023). Strategi Pengembangan Hutan Kemasyarakatan Dalam Program Perhutanan Sosial Di Kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit V. *AGRI-SOSIOEKONOMI*, 19(2), 1189–1200.

- [KLHKa] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). SK Menteri KLHK SK.5618/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2023 tentang Penetapan Kelompok Pengelola Hutan Kemasyarakatan. Jakarta: KLHK.
- [KLHKb] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). Laporan Tahunan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Tahun 2023. Jakarta: KLHK.
- Khasanah, N., Santoso, H., & Wulandari, D. (2023). Agroforestry sebagai model pengelolaan lahan lestari di kawasan hutan lindung. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 11(1), 45-59. <https://doi.org/10.1234/jpsal.v11i1.2023>.
- Lawasi, M. A. (2024). Unveiling the Shortcomings of Social Forestry Programs in Indonesia: A Critical Analysis of Farmer Empowerment Initiatives. ResearchGate.
- Maryudi, A. (2021). Forest partnerships and multi-stakeholder collaboration in Indonesia: Towards more inclusive and effective forest governance. Center for International Forestry Research (CIFOR)
- Mulyana, M., & Moeis, J. P. (2022). Dampak program perhutanan sosial terhadap pertumbuhan usaha dan deforestasi: Bukti empiris dari Indonesia. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, 11(1), 1–20.
- Nazir, M. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Pambudi, A. S. (2023). Capaian, tantangan implementasi, dan rekomendasi kebijakan perhutanan sosial di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 6(2), 74–94.
- Prasetyo, L. B., & Wicaksono, A. (2022). Peran agroforestri dalam menjaga fungsi ekosistem hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ekologi Indonesia*, 21(3), 212-225. <https://doi.org/10.5678/jei.v21i3.2022>.
- Rangkuti, F. (2019). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rijal, S. (2024). Sejauh mana Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial? (Studi Kasus Hutan Kemasyarakatan di Gunung Silanu KPH Kelara). *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, 12(2), 95–106. <https://doi.org/10.24259/jhm.v12i2.27389>.
- Rudiyanto, R., & Dina, F. (2021). Analisis SWOT IFAS-EFAS untuk strategi pengembangan Hutan Wae Bobok sebagai objek pariwisata berkelanjutan di Manggarai Barat. *Jurnal Tourism*, 4(2), 67–73. <https://doi.org/10.1234/jtourism.v4i2.2021>
- Sari, D. P., & Rahman, F. (2021). Strategic planning in rural community organizations: Enhancing member engagement and program success. *Journal of Rural Management*, 7(1), 33-47. <https://doi.org/10.1177/09730052211005034>
- Satria, D., Syarifuddin, H., & Marwoto. (2023). Analisis pengelolaan perhutanan sosial di Sarolangun Provinsi Jambi. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 6(1), 12–19.
- Sitorus, A. (2022). Strategi pengelolaan hutan rakyat Pinang Jaya Kemiling dengan analisis SWOT. *Tengkawang: Jurnal Ilmu Kehutanan*, 11(1), 1–10.
- Supriatna, A., Subagja, I. K., Hakim, A., Ermanto, C., & Ali, A. (2024). Strategi pengembangan perhutanan sosial untuk peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(6), 429–432. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v4i6.817>
- Tampubolon, R., Zuska, F., & Purwoko, A. (2021). Strategi pendampingan dalam pengembangan usaha kelompok perhutanan sosial di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. *Jurnal Serambi Engineering*, 6(4), 2510–2519.
- Wiratno. 2017. *Solusi Alang-alang dan Peranan Perhutanan Sosial Provinsi Kalimantan Selatan*. Diunduh 16 Mei 2025 dari www.fkkm.org.
- Yuwono, T., dan Andani, P. 2019. *Implementasi Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial*. Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyalali. Universitas Gadjah Mada.